

FH R  
71.23.06-03  
17140

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN KOMPETITIF

Tahun Anggaran 2002/2003




Bank - Law



## TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI

Peneliti  
Theresia Anita Christiani

 UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN		MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
Ditawar	23 JUN 2003		
Inventarisasi	073/FH/H.06/Per/103		
Klasifikasi	R-346.082/Per/t.		
Selesai Diproses	23 JUN 2003		

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Juni 2003

## LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

### LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN KOMPETITIF

Judul : TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN BANK SENTRAL  
YANG INDEPENDENT DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI

Peneliti :

Nama Lengkap dan Gelar : Theresia Anita Christiani SH.M.Hum

Jenis Kelamin : Perempuan

Pangkat /Gol/NPP : Lektor /III C/04.93.418

Bidang Keahlian : Hukum Perbankan

Fakultas : Hukum UAJY

Yogyakarta, Juni 2003

Peneliti

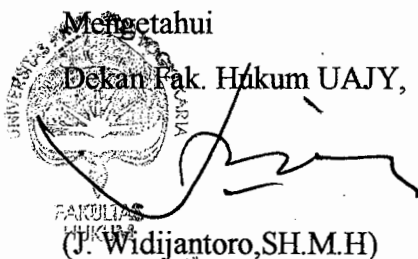


(Theresia Anita Christiani, SH.M.Hum)

NPP: 04.93.418

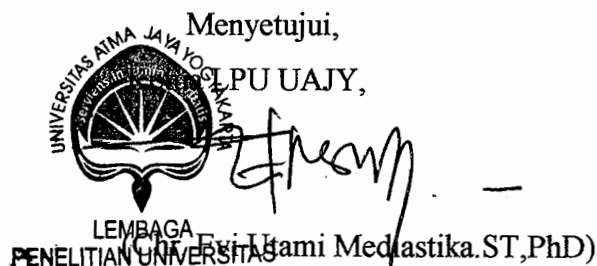
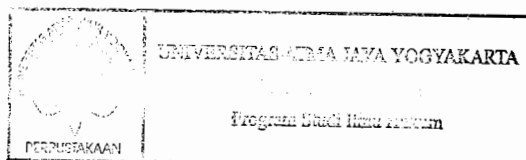
Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UAJY,

  
(J. Widijantoro, SH.M.H)

Menyetujui,

PLPU UAJY,

  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
(Hani Medastika, ST, PhD)

## RINGKASAN

Perubahan keempat UUD 1945 telah selesai dilakukan . Konstitusi yang baru tersebut telah melakukan perubahan , penambahan maupun penghapusan yang tidak hanya memberi landasan baru bagi kehidupan ketatanegaraan di bidang politik tetapi juga ekonomi . Salah satu perubahan tersebut adalah penegasan mengenai kedudukan Bank Sentral..

Pada perubahan keempat UUD 1945 yang dilakukan pada sidang MPR tahun 2002 maka keberadaan Bank Sentral ditegaskan dalam pasal 23 D dengan rumusan sebagai berikut : *"Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan dan kedudukan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang"* .

Dengan perubahan keempat yang dilakukan oleh MPR tersebut maka bank sentral mendapat penegasan yang kuat terhadap keindepondensiannya. Jaminan UUD terhadap hal tersebut sangatlah berarti, sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang bank sentral maupun yang mengatur masalah perekonomian lainnya wajib merujuk pada kemandirian yang diamanatkan oleh konstitusi .

Di Indonesia sekarang ini terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai Perbankan yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .

Berkaitan dengan adanya konstitusi yang baru yang menjadi norma dasar bagi peraturan perundangan dibawahnya maka penelitian ini bertujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbankan dalam hal ini UU no. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 masihsesuai dengan konstitusi yang sudah diamandemen. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis pengaturan kedudukan Bank Sentral dalam Amandemen konstitusi terhadap Bank Indonesia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan .Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundangan dibidang perbankan berkaitan dengan adanya amandemen konstitusi Analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999 sudah mengatur mengenai kedudukan Bank Indonesia yang mandiri dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya, hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut sudah relevan dengan Konstitusi yang sudah diamandemen. Pemberian kedudukan Bank Indonesia yang mandiri tersebut memberikan kekuasaan yang begitu besar terhadap Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam peraturan –perundangan.

## **PRAKATA**

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih , sehingga laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik . Selesaiannya laporan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu .

Laporan ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pemikiran dan wawasan oleh karena itu perbaikan dan kritik yang membangun akan dapat membantu menyempurnakan laporan penelitian ini.

Akhir kata , atas segala bantuan dan dorongan serta berbagai masukan guna penyempurnaan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	(i)
Lembar Identitas dan Pengesahan .....	(ii)
Ringkasan.....	(iii)
Prakata.....	(iv)
Daftar Isi.....	(v)
I. Pendahuluan.....	1
II. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
III. Tinjauan Pustaka.....	4
III.1. Pengertian Independensi.....	4
III.2. Stufenbau Theori dari Hans Kelsen.....	11
III.3. Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia dalam UU No 10 tahun 1998.....	12
III.4. Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia dalam UU No 23 tahun 1999 .....	15
IV. Metode Penelitian	
V. Hasil dan Pembahasan.....	19
V.1 .Pengertian Bank Indonesia.....	19
V.2. Latar Belakang Pencantuman Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Yang independen dalam UUD 1945.....	26
V.3. Pengaturan Independensi Bank Indonesia dalam UU No 10 tahun 1998 dan UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikaitkan	

dengan adanya Amandemen UUD 1945 .....	29
VI. Kesimpulan dan Saran.....	41
Daftar pustaka	



## I. PENDAHULUAN

Perubahan keempat UUD 1945 telah selesai dilakukan. Konstitusi yang baru tersebut telah melakukan perubahan, penambahan maupun penghapusan yang tidak hanya memberi landasan baru bagi kehidupan ketatanegaraan di bidang politik tetapi juga ekonomi. Salah satu perubahan tersebut adalah penegasan mengenai kedudukan dan peranan Bank Sentral. Sebelumnya dalam UUD 1945 nama Bank Indonesia tidak tercantum dalam batang tubuh yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang, nama bank Indonesia hanya tercantum dalam penjelasan pasal 23 yang menyebutkan, "*Berhubung dengan kedudukan BI yang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas*". Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bank Indonesia.

Pada perubahan keempat UUD 1945 yang dilakukan pada sidang MPR tahun 2002 maka keberadaan Bank Sentral ditegaskan dalam Pasal 23 D dengan rumusan sebagai berikut : "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan dan kedudukan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang*". Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia diberikan kedudukan yang mandiri dalam konstitusi .

Dengan perubahan keempat yang dilakukan oleh MPR tersebut maka bank sentral mendapat penegasan yang kuat terhadap keindependensiannya. Jaminan UUD terhadap hal tersebut sangatlah berarti, sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang bank sentral maupun yang mengatur masalah perekonomian lainnya wajib merujuk pada kemandirian yang diamanatkan oleh konstitusi.

Di Indonesia sekarang ini terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai Perbankan yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut dilatar belakangi oleh krisis perbankan yang melanda Indonesia bersamaan dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.

Berkaitan dengan adanya konstitusi yang baru yang menjadi dasar bagi peraturan perundangan dibawahnya maka sebagai konsekuensinya adalah bahwa peraturan perundangan dibidang perbankan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia saat ini adalah UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di lain pihak kedudukan bank yang sentral yang independent tersebut tentu saja membawa dampak yang besar bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan bagi bank Indonesia, oleh karena kedudukan yang independent tersebut dicantumkan dalam UUD 1945.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji peraturan-perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

Hasil yang diharapkan untuk dicapai dengan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis apakah peraturan perundangan di bidang perbankan masih sesuai dengan konstitusi yang sudah diamandemen. Kedua adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis pengaturan kedudukan Bank Sentral dalam amandemen konstitusi terhadap Bank Indonesia.



## **II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **II.1. Tujuan Penelitian**

Perubahan keempat UUD 1945 yang telah selesai dilakukan menghasilkan perubahan-perubahan . Perubahan tersebut antara lain yang tercantum dalam Pasal 23 D yang mengatur tentang keberadaan Bank Sentral yang susunan dan kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan adanya konstitusi yang baru tersebut maka ketentuan yang akan yang menjadi dasar bagi peraturan perundangan dibawahnya . Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbankan dalam hal ini UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 masih sesuai dengan konstitusi yang sudah diamandemen tersebut..Tujuan yang kedua adalah untuk untuk mengetahui konsekuensi yuridis pengaturan kedudukan Bank Sentral dalam Amandemen konstitusi terhadap bank Indonesia.

### **II.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat kepada para pembuat kebijakan supaya dapat mengetahui relevansi pencantuman kedudukan Bank Indonesia yang independent terhadap peraturan perundangan di bidang perbankan.

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tujuannya

### III. TINJAUAN PUSTAKA

#### III.1 Pengertian Independensi.

Terminologi independent memiliki cakupan cukup luas, memiliki berbagai pengertian “ *Not depending on auothirity , self governing, not depend on something for validity or efficiency, not supported by public fund (for institution) unwilling to be under obligation to others, independent, of any political party and for politician*” (Rijanto Sastro Atmodjo, Jawa Pos 12 Juni 1999) Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa jika suatu bank sentral menhendaki menjadi suatu lembaga yang independent maka harus memenuhi syarat-syarat yang diuraikan diatas. Lebih lanjut dikatakan bahwa :

Suatu bank sentral yang efektif haruslah kuat dengan ekonomi yang luas dalam operasinya dan terlepas dari campur tangan partisan serta tekanan partai politik. Sebagai suatu lembaga independent di lingkungan pemerintah, bank sentral memiliki kemampuan dan kewenangan judgement atau menilai kebijakan moneter namun tidak berada pada posisi isolasi terhadap seluruh kebijakan ekonomi nasional. Dalam pengertian luas suatu bank sentral beroperasi dalam masyarakat demokrasi yang terbuka perlu berkembang dan mempertahankan diri atas pemahaman yang diterima masyarakat luas . Kekuatan dan tanggung jawab bank sentral terkait erat dengan prinsip politik yang dianut pemerintah yang lazimnya baik secara historis maupun tradisional, keterkaitan utama akan terletak pada masalah keuangan pemerintah. (Rijanto Sastro Atmodjo, Jawa Pos 12 Juni 1999).

Dari uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pengertian independensi Bank Indonesia maka independensi yang dikehendaki Bank Indonesia adalah independensi yang tidak mutlak, terutama keterkaitan pemerintah dan bank Indonesia dalam masalah keuangan pemerintah.

UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 juga tidak memberikan pengertian tentang independensi Bank Indonesia, tetapi dari beberapa pasal didalam UU Nomor 23 Tahun 1999 dapat diketahui apa sebenarnya yang dimaksud

dengan independensi Bank Indonesia . Pasal tersebut antara lain Pasal 4 ayat 2 UU No 23 Tahun 1999 yang berisi :

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini.

Ketentuan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa Bank Indonesia adalah lembaga yang mandiri, pihak lain dilarang untuk campur tangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang menjadi wewenang Bank Indonesia.

Selanjutnya pasal 8 mengatakan :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Tugas tersebut masing-masing kemudian dijabarkan secara lebih lengkap seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter maka bank Indonesia mempunyai kewenangan seperti :

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan
2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - a. operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing
  - b. penetapan tingkat diskonto
  - c. penetapan cadangan wajib minimum
  - d. pengaturan kredit atau pembiayaan. (pasal 12)

Dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk mengelola cadangan devisa.

Tugas kedua Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugas tersebut maka Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk :

- a. melaksanakan dan memberkan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistim pembayaran.
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya,
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dalam tugasnya menjaga dan mengatur sistem pembayaran tersebut bank indonesia juga mempunyai wewenag untuk mengatur sisitem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Bank Indonesia juga berwenagn menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Kewenangan-kewenangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran tercantum dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU No 23 tahun 1999.

Tugas yang ketiga yaitu tugas mengatur dan mengawasi bank . Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Selain itu bank Indonesia mempunyai kewenangan :

- a. memberikan ijin dan mencabut izi usaha bank;
- b. memberikan ijin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
- c. memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Sedangkan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan maka tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh bank indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

- a. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indoensia
- b. Apabila diperlukan kewajiban tersebut juga dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank.
- c. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- d. Apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.
- e. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi patut diduga merupakan tindak pidana perbankan.

- f. Apabila diperlukan bila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, bank Indonesia pada hari itu dapat mencabut perintah penghentian transaksi.

Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 9 juga memberi keterangan lebih lanjut mengenai independensi Bank Indonesia, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dari isi ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud pengertian independensi Bank Indonesia adalah Bank Indonesia diberikan kemandirian dalam menjalankan tujuan dan tugasnya, pihak lain termasuk pemerintah dilarang untuk melaksanakan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut.

Kemandirian suatu bank sentral juga dapat dilihat dari beberapa kriteria (Zainal Asikin , 1997:16):

- a. Pengangkatan gubernurnya/direktornya

Dalam pengangkatan gubernurnya harus melalui persetujuan parlemen, dengan demikian *legal independence* bank sentral dapat lebih terjamin.

- b. Masalah pertanggungjawaban

Bank sentral seyogyanya tidak tunduk pada suatu departemen tertentu. Bank sentral yang mandiri biasanya bertanggungjawab kepada parlemen bukan kepada Presiden.

c. Penetapan kebijakan moneter

Bank sentral yang independent biasanya mempunyai kekuasaan menetapkan kebijakan moneter. Dalam hal bila kebijakan moneter ditetapkan oleh pemerintah sedangkan bank sentral hanya sebagai pelaksananya maka dapat dikatakan bank sentral tidak mandiri.

Ketiga kriteria di atas dapat menjadi pedoman apakah suatu bank sentral bersifat mandiri atau tidak. Ketiga kriteria di atas dapat dijadikan pedoman apakah Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan pihak manapun atau tidak.

Untuk lebih memperluas pengertian independensi Bank Indonesia maka dibawah ini akan diuraikan tentang independensi dari bank sentral Amerika yang dapat digunakan untuk memberikan perbandingan tentang makna independensi itu sendiri.

Bank sentral Amerika disebut The Federal Reserve System atau sering disingkat dengan sebutan The Fed. The Federal Reserve system merupakan bank sentral ketiga yang dibentuk di Amerika Serikat. The Fed terdiri dari lima kelompok yang "interdependent dan interkoneksi". (Frederics Mishkin dan Stanley G, Eakin, dalam bukunya Financial markets & Institutions, Kompas 23 Desember 2000).

Beberapa catatan dalam struktur The Fed tersebut dapat dilihat terdapat keterwakilan antara sektor keuangan dan sektor riil, juga dapat dilihat wakil-wakil

dari wilayah-wilayah negara bagian yang paling tidak dapat mewakili suara-suara daerah yang biasanya tidak terdengar oleh pusat.

Ada 5 penentu yang membuat The Fed independent (Marihot H. Tambunan. Dibalik Independensi Bank Sentral amerika Serikat, Kompas 23 Desember 2000)

1. Struktur organisasinya
2. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur Bank Sentral yang merupakan norma dasar yang akan menjamin tegaknya sebuah bank sentral yang independent.  
Di Indonesia Undang-Undang tentang yang mengatur tentang bank sentral juga sudah ada yaitu UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut sudah diatur mengenai independensi Bank Indonesia yang termuat dalam pasal-pasal nya.
3. Masa jabatan anggota dewan, anggota dewan gubernur sepanjang 14 tahun dan chair-person selama 4 tahun dan dapat diperpanjang lagi..
4. Masa jabatan anggota dewan Gubernur tidak dapat diperpanjang lagi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi intervensi yang berlebihan dari anggota dewan gubernur.
5. Tata cara pensiun, dari dewan gubernur diatur sedemikian rupa sehingga bila ada yang berhenti dalam masa jabatan Presiden Amerika serikat maksimal dua orang dan dibuat tidak berurutan, dengan demikian dihindarkan adanya intervensi eksekutif, walaupun ada maka tidak berpengaruh apada independensi secara keseluruhan.
6. Tugas utama dari bank sentral adalah menjaga kestabilan moneter.

Sifat independent tersebut tidak menghilangkan kerjasama dan hubungan baik dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.



Gambaran independensi The Fed tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas utamanya untuk menjaga kestabilan moneter maka diberikan independensi melalui undang-undang yang berlaku yang diberikan dalam berbagai unsur, namun demikian kemandirian tersebut tidaklah mutlak, karena kebijakan-kebijakan the Fed hanya dapat tercapai bila kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dibawah Presiden Amerika serikat pada saat itu. Praktek independensi ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan pelaksanaan independensi yang ada di Indonesia.

Bank Indonesia pada dasarnya adalah pengemban tugas pokok dalam membantu pemerintah (Muhamad Djumhana, 1995: 165) yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur dan mengawasi bank.

Tujuan adanya pemberian sifat independent pada Bank Indonesia adalah supaya Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya dapat lebih baik. Hal itu disebabkan ketidakmandirian Bank Indonesia yang diberikan oleh peraturan perundangan sebelumnya telah menjadi salah satu penyebab munculnya krisis perbankan.

### **III.2 Stufenbau theorie dari Hans Kelsen**

Kelsen selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan teori Jenjang (Stufenbau theorie) yang semula di kemukakan oleh Adolf Merkl (Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2003, 116).

Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida . Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma

yang lebih tinggi . semakin tinggi suatu norma , akan semakin abstrak sifatnya , dan sebaliknya , semakin rendah kedudukannya , akan semakin konkret norma tersebut . Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida , disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar) atau Ursprungnorm.

Teori jenjang Kelsen ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya bernama Nawiasky . perbedaanya Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif , hukum disini diartikan identik dengan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut teori Hans kelsen dan Hans Nawiasky. Hal tersebut tampak jelas dengan Ketetapan MPRS No XX /MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata urutan Peraturan perundangan Republik Indonesia . Ketetapan MPRS tersebut diperkuat lagi dengan ketetapan MPR V/MPR/1973 tentang peninjauan Produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat sementara Republik Indonesia dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.

Teori Hans Kelsen ini digunakan untuk membantu menganalisis bahwa keberadaan UUD 1945 yang sudah diamandemen haruslah menjadi dasar bagi peraturan perundangan dibawahnya yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 23 tahun 1999

### **III.2 Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia dalam UU No 10 Tahun 1998**

Salah satu penyebab munculnya krisis moneter adalah ketidakmandirian Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, hal tersebut menyebabkan runtuhnya

perbankan nasional pada saat itu. Oleh karena itu UU Nomor 10 Tahun 1998 dimaksudkan untuk dapat memberikan kedudukan yang lebih baik bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pemberian kedudukan yang diwujudkan dalam kewenangan Bank Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 16 tersebut berisi :

Semua pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat dikaji bahwa Pimpinan Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin kepada pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

Selanjutnya pasal 18 mengatakan:

- (1)Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia .
- (2)Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (3)Pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4)Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor cabang Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dikaji bahwa Pembukaan kantor cabang Bank umum atau kantor perwakilan lain baik didalam negeri atau diluar negeri hanya dapat dilakukan atas ijin dari pimpinan bank Indonesia. Pada undang –undang perbankan sebelumnya yang berwenang memberikan ijin adalah menteri keuangan bukan pimpinan

bank Indonesia. Hal tampak intervensi pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia . Intervensi tersebut tidak diperbolehkan lagi dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan memberi wewenang yang penuh kepada pimpinan bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi atau campur tangan pihak eksekutif dalam kinerja Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia juga dapat dilihat dalam pasal 19 UU No 10 tahun 1998 yang

mengatakan :

- (1)Pembukaan kantor cabang Bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan bank Indonesia .
- (2)Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia

Selanjutnya Pasal 20 UU NO 10 tahun 1998 yang mengatakan :

- (1) Pembukaan kantor cabang , kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan bank Indonesia.

Dari bunyi Pasal 19 dan 20 UU No 10 tahun 1998 tersebut dapat dilihat bahwa untuk pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu Bank Perkreditan Rakyat dan kantor perwakilan bank yang ada di luar negeri hanya dapat diberikan atas ijin pimpinan Bank Indonesia. Kewenangan ini pada UU perbankan No 7 tahun 1992 hanya diberikan kepada menteri keuangan. Kewenan BI juga tampak dalam pasal 28 ayat (1)UU No 10 Tahun 1998 yang mengatakan :

- (1) Merger,konsolidasi , dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan bank Indonesia.

Pasal-pasal tersebut di atas tampak memberikan pengaturan mengenai kedudukan bank Indonesia yang berupa kewenangan untuk memberikan ijin bagi bank yang kan melakukan merger, konsolidasi,dan akuisisi. Bila ketentuan tersebut dibandingkan

dengan UU No 7 tahun 1992 maka kewenangan tersebut diberikan kepada menteri keuangan yang membawa konsekwensi adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan moneter. Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik

Selanjutnya pasal 37 A UU No 10 tahun 1998 juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank tersebut bila menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan sistem perbankan nasional. Hal ini berarti bahwa Pimpinan bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mencabut izin bank yang dianggap mengganggu sistem perbankan nasional. Kewenangan ini diberikan untuk menghindari campur tangan eksekutif dalam pengambilan keputusan. Bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maka dapat dilihat bahwa yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin adalah menteri keuangan, hal tersebut membawa konsekwensi adanya campur tangan eksekutif dalam penentuan kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia. Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak dapat menjalankan tugas dan tujuannya secara baik.

### **III.3. Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia dalam UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.**

UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan pengaturan mengenai kedudukan Bank Indonesia . Pasal tersebut antara lain pasal 4 ayat 2 UU No 23 Tahun 1999 yang berisi :

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 8 yang mengatakan :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 9 juga memberikan pemahaman mengenai kedudukan bank Indonesia seperti tampak dalam

kalimatnya yang berbunyi:

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal tersebut mempertegas apa yang sudah dikatakan dalam pasal 8 yaitu bahwa kedudukan dan kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Yaitu mencapai kestabilan nilai rupiah.

## **IV. Metode Penelitian.**

### **IV.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-perundangan dan buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. (Soerjono Soekanto, 1984, 51)

### **IV.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan-perundangan, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan Perubahannya dan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan bidang perbankan, antara lain UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan keterangan serta penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dipakai dalam

penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal-jurnal, majalah\surat kabar, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum.

#### **IV.3 . Metode pengumpulan data**

Sarana untuk mengumpulkan data yaitu melalui studi pustaka atau dokumen. Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan tidak secara langsung pada responden tetapi melalui data-data tertulis yang mendukung permasalahan yang diteliti.

#### **IV.4. Metode analisis data**

Data yang terkumpul telah dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **V.1. Tinjauan umum tentang Bank Indonesia**

#### **1. Pengertian Bank Indonesia**

Sebuah bank sentral dibutuhkan oleh suatu negara untuk mengatur seluk beluk tentang uang, juga untuk mengatur dan mengontrol kebijaksanaan di negara yang bersangkutan . walaupun pada kenyataannya peran bank sentral dalam suatu negara belum dapat efektif karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya bank sentral tersebut.

Negara Indonesia mempunyai bank sentral untuk pertama kalinya pada saat didirikannya BNI 1946 yang pada saat itu merangkap bank komersial juga merangkap sebagai bank sentral Fungsi BNI 1946 sebagai PerPu No.2 Tahun 1946 tersebut antara lain mengatakan :

1. BNI adalah bank pemerintah untuk mengatur pengeluaran peredaran uang kertas bank sebagai alat tukar serta memperbaiki peredaran alat pembayaran.
2. BNI melakukan kebijaksanaan diskonto yang aktif untuk mencapai ketetapan harga.
3. BNI mempunyai kegiatan untuk memberi kredit kepada badan-badan pemerintah, bank-bank dan badan perekonomian.
4. BNI memberikan kredit kepada negara Republik Indonesia.
5. Uang kertas BNI merupakan satu-satunya uang kertas yang diakui dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

6. BNI menyimpan uang negara dan melakukan pembayaran penerimaan dan pembukuan rekening untuk negara, perusahaan negara dan perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Disamping itu BNI menyimpan barang-barang barang-barang negara, perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh menteri keuangan RI.
7. BNI tidak boleh memberikan kredit kepada swasta atau meneriam giro, deposito, dari pihak swasta kecuali di tempat yang sama sekali belum ada bank atau kecuali jika memperoleh ijin dari menteri keuangan.

Peran BNI 1946 sebagai bank sentral kemudian diubah dengan Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Undang-Undang ini mengubah De Javasche Bank NV menjadi bank Indonesia sebagai bank sentral. Pada saat itu eksistensi De Javasche Bank NV berada seiring dengan BNI 1946 sampai status BNI 1946 sebagai bank sentral dicabut dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955. Sejak saat itu hanya diakui satu bank sentral yaitu Bank Indonesia yang semula namanya De Javasche NV tersebut.. Selanjutnya muncul peraturan yang khusus mengatur tentang bank sentral yaitu undang-undang nomor 13 Tahun 1968 Tentang bank sentral dan yang terakhir terdapat beberapa penyempurnaan dan perubahan yang berkaitan dengan bank sentral yang dituangkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## **2. Tujuan Bank Indonesia**

Tujuan dari Bank Indonesia tercantum dalam pasal 7 UU no 23 Tahun 1999 yang menyatakan:

Tujuan bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin perkembangan laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dimana uang yang beredar dalam masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang ada dimasyarakat, keadaan ini menyebabkan harga barang barang menjadi naik atau menjadi lebih mahal. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan mata uang atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Di lain pihak ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan nilai rupiah antara lain keadaan perekonomian , keadaan sosial politik dan keamanan suatu negara. Hal ini berarti bahwa kestabilan nilai rupiah tidak hanya didukung oleh kebijaksanaan bank Indonesia tetapi faktor-faktor tersebut harus tetap mendukung satu dengan yang lain.

### **3. Tugas dan kewenangan Bank Indonesia**

Selanjutnya untuk dapat tercapai kestabilan nilai rupiah tersebut maka terdapat tugas yang dituangkan dalam pasal 8 UU No 23 Tahun 1999. Yaitu :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan moneter maka bank Indonesia mempunyai kewenangan menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan

sasaran-sasaran laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter .

Tugas ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara :

1. Operasi pasar terbuka dipasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah , kadang-kadang juga dipakai untuk jual beli equity, emas dan valuta asing. (Munir Fuadi, 1999,123). Bila didalam masyarakat uang yang beredar terlalu banyak maka Bank Indonesia akan menyerap uang yang terlalu banyak beredar tersebut dengan penjualan surat-surat berharga pada masyarakat . Dengan penjualan tersebut diharapkan dana masyarakat yang berlebihan akan terserap kembali . Begitu juga sebaliknya jika uang yang beredar dalam msyarakat terlalu sedikit maka Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga sehingga uang yang beredar akan semakin banyak.

2. Penetapan tingkat diskonto.

Penetapan tingkat diskonto menurut penjelasan pasal 10 huruf b angka 2 yaitu :

Penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh bank Indonesia anantara lain dalam operasi pasar terbuka dalam rangka kredit maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of last resort.

Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan memeperendah atau mempertinggi tingkat suku bunga. Jika keadaan didalam masyarakat uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak ,maka bank sentral mengeluarkan kebijaksanaan yang bertujuan untuk menyerap uang itu kembali dengan mempertinggi suku

bunga bank yang berarti uang yang dikeluarkan dalam bentuk kredit akan berkurang dan masyarakat akan lebih memilih menyimpan uang di bank disebabkan suku bunga yang tinggi dengan begitu uang yang beredar di masyarakat dapat ditekan. Sebaliknya jika uang beredar di masyarakat terlalu sedikit, maka bank sentral mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperendah suku bunga bank. Hal ini mengakibatkan, uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak, artinya bahwa jika suku bunga diperendah maka jumlah pemberian kredit juga akan lebih banyak yang akan menyebabkan uang yang beredar dalam masyarakat juga semakin banyak.. Kebijaksanaan bank sentral untuk memperendah tingkat suku bunga bank disebut easy money policy uang yang tujuannya adalah untuk memperbesar jumlah uang di masyarakat, sedangkan kebijaksanaan untuk mempertinggi tingkat suku bunga bank disebut tight money policy atau kebijaksanaan uang ketat yang tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang ada di bank.

### 3. Penetapan cadangan wajib minimum

Penetapan cadangan minimum merupakan kebijaksanaan bank sentral untuk mempertinggi atau memperendah cash rasionya , yang juga akan diikuti oleh bank-bank lain (Soedijana, 1993;169). Hal ini berarti jika uang yang beredar didalam masyarakat tersebut terlalu banyak maka bank sentral dapat memberikan kebijaksanaan untuk dapat memperbes cash ratio yang ada di perbankan , dan sebaliknya jika uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit maka bank sentral dapat mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkecil

kebijaksanaan cash ratio yang ada pada bank sehingga pengeluaran kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan semakin besar

Tugas kedua dari bank sentral yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran . Tugas tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas tersebut antara lain :

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan ijin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran .

Tujuan dari pengaturan sistem pembayaran tersebut adalah untuk keamanan dan efisiensi dalam pelaksanaan.

Tugas yang ketiga dari bank adalah mengatur dan mengawasi bank. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya , dan memelihara kepercayaan masyarakat (Muhamad Djumhana,1996:164).Dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut maka bank sentral diberikan kewenangan untuk melakukan bimbingan , pengarahan pada bank –bank yang sedang beroperasi ataupun dalam bentuk pemeriksaan dan peringatan pada bank-bank yang beroperasi.

Fungsi ketiga ini merupakan fungsi yang terpenting diantara fungsi lain. Kesehatan perbankan dan dengan demikian juga baik buruknya ekonomi terletak pada kinerja bank

Indonesia dalam mengawasi dan membina perbankan di Indonesia perbankan di Indonesia (Gunarto Suhardi, tanpa tahun, halaman 15). Dalam melaksanakan tugas ini maka bank Indonesia dapat dapat memberikan peraturan yang termasuk keputusan tata usaha negara baik yang bersifat umum maupun individual (pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999). Bank sentral dapat juga mengganti direksi /pimpinan bank umum swasta karena dinilai buruk kinerjanya). Dalam melaksanakan tugas pengawasannya ini maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain :

1. Pengawasan tak langsung

yakni dengan melakukan penelitian dari berbagai laporan berkala yang wajib dikirimkan kepada bank Indonesia .Laporan ini harus dilakukan dengan sebenar-benarnya tidak boleh direkayasa.Laporan ini bila tidak merupakan laporan yang sebenarnya dapat direksi bank dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 milyar ( Pasal 49 ayat (1) )

2. Pengawasan on the spot

yaitu dengan datang langsung ke bank yang bersangkutan dan memeriksa segala pembukuan, dokumen-dokumen dan catatan-catatan lainnya dan mencocokkannya dengan laporan lainnya.

3. Cara pemeriksaan ketiga dalah dengan melakukan onside permanent supervisory presence . dalam pemeriksaan ini para petugas Bank Indonesia ditempatkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan pada beberapa bank yang menurut bank Indonesia perlu disupervisi secara khusus.(Gunarto Suhardi, tanpa tahun, 16)

Tugas pengawasan dan pembinaan ini akan sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank yang pada akhirnya akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

## **V.2. Latar Belakang Pencantuman Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independent Dalam UUD 1945.**

Sidang tahunan Majelis permusyawaratan Rakyat telah menghasilkan UUD 1945 dan perubahannya. Hal ini berarti bahwa UUD 1945 yang sekarang ada adalah UUD 1945 yang mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat . UUD 1945 yang ada selama ini dipakai sebagai norma yang menjadi dasar peraturan perundangan dibawahnya . Hal ini berarti bahwa peraturan perundangan dibawah undang-undang dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya.

Amandemen yang terjadi dalam UUD 1945 tersebut,menghasilkan perubahan yang berkaitan dengan keberadaan Bank Sentral yang tercantum dalam pasal 23 D UUD 1945 dan Perubahannya. Pasal tersebut antara lain menyebutkan bahwa Negara memiliki Bank Sentral yang susunan dan kedudukannya, kewenangan dan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ketentuan pasal 23 D UUD 1945 dan Perubahannya tersebut pada intinya menginginkan terdapatnya bank sentral yang mandiri terlepas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya. Sebelumnya keberadaan bank sentral tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945, baru setelah diamandemen keberadaan bank sentral ditegaskan dalam pasal 23 D UUD 1945 dan perubahannya tersebut.



Konsekuensi dari ketentuan adanya Bank sentral yang mandiri yang dituangkan dalam UUD 1945 dan Perubahannya tersebut yaitu peraturan perundangan dibawah UUD 1945 dan Perubahannya tersebut tidak boleh bertentangan atau harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam UUD 1945 dan Perubahannya. Sekarang ini ini di Indonesia terdapat dua Undang –undang yang mengatur mengenai perbankan yaitu UU nomor 10 tahun 1998 dan UU nomor 23 Tahun 1999.

Sebelum membahas mengenai permasalahan yang ada dibawah ini akan diuraika mengenai latar belakang dicantumkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam amandemen Undang-undang dasar 1945 yaitu :

1. Dilihat dari sudut historis yang didirikan pada tahun 1953 dengan UU Nomor 1953 sebagai tindak lanjut dari penggantian De javasche Bank adalah bentuk NV yang telah ada sejak tahun 1922, sebagai bank sirkulasi yang sudah barang tentu telah memiliki nilai dan sejarah tersendiri dalam sistem perbankan dan keuangan Indonesia.
2. Kinerja bank indonesia yang cenderung mengecewakan selama ini yang dikarenakan tidak adanya undang-undang yang spesifik mengatur tentang bank indonesia sebelum adanya UU nomor 23 tahun 1999.
3. Pengelolaan Bank indonesia secara mandiri akan lebih memberikan landasan kepercayaan dan ini tercermin dari apa yang disebut "*money regulation power*" (kekuasaan mengatur uang ) ( Muhammad Nurliff, 2002:6). Hal ini bercermin dari negara yang selama ini memelihara kestabilan moneternya biasanya mencantumkan kedudukan bank sentral yang mandiri dalam konstitusinya. Sebagai contoh negara

Jerman dalam amandemen konstitusinya yaitu undang-undang Dasar 16 juli 1998 yang mengatur Bundes bank. Kemudian negara Swedia dalam amandemen Undang-Undang dasar tahun 1989 dalam mengatur The Bank of Sweden. Demikian juga negara Filipina memberikan kemandirian dalam konstitusi yang mereka punya.

4. Pemberian kemandirian bank sentral diharapkan dapat membuat Bank Indonesia lebih profesional , kuat dan mantab dalam menjalankan tugas dan tujuannya.
5. Pemberian keindependensian bank indonesia ini diharapkan tidak berarti tidak ada kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan tugas dan tujuannya. Koordinasi yang baik dengan pihak –pihak terkait akan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tujuannya.

Bila melihat dari uraian di atas dapat dikaji bahwa pencantuman bank sentral yang mandiri yang melaksanakan fungsi kebijakan di bidang moneter adalah sangat relevan untuk diatur dalam konstitusi. Hal tersebut juga dilandasi bahwa peranan dan kedudukan bank sentral yang menjalankan berbagai fungsi antara lain fungsi mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, fungsi kebijakan moneter, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan maupun fungsi kelancaran sistem pembayaran , haruslah memiliki atau berdasarkan landasan yang kuat. Menempatkan posisi bank sentral yang demikian kuat didalam konstitusi berlandaskan pemikiran bahwa peran bank sentral sangatlah penting dalam sistem penyelenggaraan negara , oleh karena itu memang dirasakan sangat tepat menempatkan kedudukan bank sentral yang mandiri dalam amandemen konstitusi di negara Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan supaya bank sentral mempunyai landasan

yang kuat dalam menjalankan tugas dan tujuannya karena dengan terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan bank Indonesia maka tentu saja hal tersebut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sendi perekonomian di Indonesia.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pencantuman kedudukan yang mandiri dari bank sentral dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut membawa konsekwensi bahwa peraturan perundangan yang mengatur tentang perbankan harus merujuk pada UUD 1945 atau konstitusi tersebut. Dengan kata lain apakah peraturan perundangan di bidang perbankan sekarang ini sudah memberikan kedudukan yang mandiri dalam ketentuannya. Pengaturan independensi bank Indonesia dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut tentu saja memberi kewenangan luar biasa kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tujuannya, dilain pihak kewenangan yang cukup besar tersebut tentu saja memberikan tanggung jawab yang begitu besar juga kepada Bank Indonesia dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana konsekwensi yuridis bagi bank Indonesia karena kedudukan yang independen tersebut. Permasalahan tersebut akan diuraikan dan dianalisis secara panjang lebar di bawah ini.

### **V.3. Pengaturan Independensi Bank Indonesia dalam UU No 10 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikaitkan dengan adanya Amandemen UUD 1945**

Pasal 23 D UUD 1945 dan Perubahannya mengatakan :

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan dan kedudukan dan kewenangan, tanggung jawabnya dan independensinya diatur dengan undang-undang

Dari ketentuan tersebut dapat dikaji bahwa Bank sentral dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank Indonesia diberikan kedudukan yang mandiri, yang ditegaskan dalam Konstitusi yang ada. Konsekwensinya bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan bidang perbankan harus merujuk kepada konstitusi yang ada .

#### **V.4. Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia dalam UU No 10 Tahun 1998**

Independensi Bank Indonesia sendiri dikatakan haruslah tidak mutlak artinya kalau memang intervensi yang ada tersebut bersifat positif dan menunjang tugas-tugasnya maka hal tersebut diperbolehkan.

UU Nomor 10 Tahun 1998 dibentuk setelah terjadinya krisis moneter yang salah satu pemicunya adalah runtuhnya sektor perbankan di Indonesia. Hancurnya sektor perbankan tersebut disebabkan tidak dipakainya prinsip kehati-hatian oleh para bankir dan ketidak mandirian bank indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya antara lain dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank.

UU No 10 tahun 1998 juga memuat ketentuan –ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan Bank indonesia yang mandiri. Pemberian sifat independen tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 16 tersebut berisi :

Semua pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Selanjutnya pasal 18 mengatakan:

(1)Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia .

(2)Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3)Pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan dahulu kepada Bank Indonesia.

(4)Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor cabang Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat (2),dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari Pasal 16 dan 18 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut tampak bahwa pimpinan bank indonesia mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan bank di luar negeri .Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian izin tersebut pimpinan Bank Indonesia tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah. Pada undang –undang perbankan sebelumnya yang berwenang memberikan izin adalah menteri keuangan bukan pimpinan bank Indonesia. Hal tampak intervensi pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Intervensi tersebut dicoba di hindari dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan memberi wewenang yang penuh kepada pimpinan bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi atau campur tangan pihak eksekutif dalam kinerja bank Indonesia.

Pengaturan mengenai kedudukan Bank Indonesia juga dapat dilihat dalam Pasal 19 UU No 10 tahun 1998 yang mengatakan :

(1)Pembukaaan kantor cabang Bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan bank Indonesia .

(2)Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia

Selanjutnya Pasal 20 UU N0 10 tahun 1998 yang mengatakan :

(2) Pembukaan kantor cabang , kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan bank Indonesia.

Pasal 19 dan pasal 20 diatas memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberi ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu , kantor perwakilan bank di luarnegeri untuk Bank Perkreditan Rakyat.

Kewenangan ini pada UU perbankan No 7 tahun 1992 hanya diberikan kepada menteri keuangan. Independensi BI juga tampak dalam pasal 28 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 yang mengatakan :

- (1) Merger, konsolidasi , dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan bank Indonesia.

Pasal-pasal tersebut diatas tampak memberikan independensi berupa kewenangan untuk memberikan ijin, bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan UU No 7 tahun 1992 maka kewenangan tersebut diberikan kepada menteri keuangan yang membawa konsekwensi adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan moneter . Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik

Selanjutnya Pasal 37 A UU No 10 tahun 1998 juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mencabut ijin usaha bank tersebut bila menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan sisitem perbankan nasional. Hal ini berarti bahwa Pimpinan bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mencabut izin bank yang dianggap mengganggu sistem perbankan nasional. Kewenangan ini diberikan untuk menghindari campur tangan eksekutif dalam pengambilan keputusan. Bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maka dapat dilihat bahwa yang diberikan kewenangan untuk memberikan ijin adalah menteri keuangan, hal tersebut membawa konsekwensi adanya campur tangan eksekutif dalam

penentuan kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia. Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak dapat menjalankan tugas dan tujuannya secara baik.

Dari uraian tersebut dapat dikaji bahwa UU No 10 tahun sudah memberikan kedudukan yang mandiri pada Bank Indonesia yang tampak pada pasal 16, 18, pasal 19, 20, 28 . Tujuan diberikannya kemandirian Bank Indonesia adalah agar Bank Indonesia dapat dengan baik melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mencapai tujuannya untuk menstabilkan nilai rupiah. Dihubungkan dengan pemberian kedudukan yang mandiri bagi bank sentral dalam konstitusi sekarang ini maka peraturan perundangan di bidang perbankan yaitu UU No 10 tahun 1998 sudah sesuai dengan konstitusi yang ada.

#### **V.5. Pengaturan Kedudukan Bank Indonesia Dalam UU No 23 tahun 1999.**

UU No 23 tahun 1999 memberikan pengaturan mengenai kedudukan Bank Indonesia. Hal tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU No 23 Tahun 1999 yang berisi :

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini.

Dari bunyi pasal 4 tersebut dapat dilihat bahwa Bank Indonesia diberikan kedudukan yang mandiri, sehingga pihak manapun dilarang turut campur tangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 8 yang mengatakan :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- e. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ;

- f. mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 8 tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam mencapai tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah maka Bank Indonesia mempunyai tugas –tugas yang harus dilaksanakan tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Selanjutnya Pasal 9 juga memberi keterangan mengenai kedudukan Bank Indonesia yang berisi:

- (1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9 tersebut memberikan penjelasan bahwa karena kedudukan Bank Indonesia yang mandiri maka Bank Indonesia berhak menolak campur tangan dari pihak manapun terutama pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dari uraian di atas dapat dikaji bahwa UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia sudah memberikan pengaturan tentang kedudukan bank indonesia yang mandiri yang tampak pada Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 UU No 23 tahun 1999 tersebut. Sedangkan UU No 10 tahun 1998 juga sudah memberikan kedudukan yang mandiri kepada Bank Indonesia yang tampak pada Pasal 16, 18, 19, 20, 28 , 37 A UU No 10 tahun 1998 . Tujuan diberikannya kemandirian Bank indonesia adalah agar bank indonesia dapat dengan baik melaksanakan tugas dan kewenangannya d dalam mencapai tujuannya untuk menstabilkan nilai rupiah. Dihubungkan dengan pemberian kedudukan yang mandiri bagi bank sentral dalam konstitusi sekarang ini maka peraturan perundangan dibidang perbankan yaitu UU nomor 10 tahun 1999 dan UU nomor 23 tahun 1999 sudah sesuai dengan konstitusi yang ada.



## **V.6. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank Sentral**

### **dalam Amandemen Konstitusi terhadap Bank Indonesia**

Sebelumnya telah diuraikan bahwa Independensi bank Indonesia diartikan bahwa bank Indonesia diberikan kedudukan yang mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya (menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan membina dan mengawasi bank). Kemandirian tersebut diberikan agar dalam mencapai tujuannya yaitu menstabilkan nilai rupiah Bank Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Kedudukan yang mandiri tersebut dituangkan dalam konstitusi RI yaitu UUD 1945 pada perubahan keempat yang dituangkan dalam pasal 23 D UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa : *“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan dan kedudukan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang”*.

Dengan perubahan keempat yang dilakukan oleh MPR tersebut maka bank sentral mendapat penegasan yang kuat terhadap keindependensiannya. Hal tersebut dimaksudkan supaya Bank Indonesia dapat menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik.

Kedudukan Bank Indonesia yang mandiri juga sudah diberikan dalam peraturan perundangan di bidang perbankan yang sebenarnya sudah ada sebelum adanya ketentuan pasal 23 D UUD 1945 tersebut. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan kemandirian Bank Indonesia. Pasal 16 tersebut antara lain berisi bahwa kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan harus mendapat izin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Dari ketentuan tersebut berarti bahwa Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ijin tersebut.

Kemudian Pasal 18 mengatakan antara lain bahwa pembukaan kantor cabang bank Umum harus mendapat ijin dari pimpinan Bank Indonesia. Pada undang-undang perbankan sebelumnya yang berwenang memberikan ijin adalah menteri keuangan bukan pimpinan bank Indonesia. Hal tampak intervensi pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Intervensi tersebut dicoba di hindari dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan memberi wewenang yang penuh kepada pimpinan bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi atau campur tangan pihak eksekutif dalam kinerja bank Indonesia. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 19 dan 20 UU Nomor 10 tahun 1998 yang pada intinya mengatakan Pembukaan kantor cabang , kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia juga tampak pada Pasal 28 yang memberikan kewenangan Bank Indonesia dalam memberikan ijin bagi bank yang akan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pasal-pasal tersebut diatas tampak memberikan independensi berupa kewenangan untuk memberikan ijin, bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan UU No 7 tahun 1992 maka kewenangan tersebut diberikan kepada menteri keuangan yang membawa konsekwensi adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan moneter . Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik

Selanjutnya Pasal 37 A UU No 10 tahun 1998 juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mencabut ijin usaha bank tersebut bila menurut bank indonesia hal tersebut akan membahayakan perekonomian nasional.

UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan kedudukan yang mandiri terhadap bank Indonesia yang antara lain tercantum dalam Pasal 4, Pasal 8 ,dan Pasal 9 UU Nomor 23 tahun 1999 . Pasal-pasal tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan independensi adalah kemandirian dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah . Kemandirian tersebut dijabarkan dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 35 UU No 23 Tahun 1999.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan menstabilkan nilai rupiah maka Bank Indonesia diberikan kedudukan yang cukup kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Kuatnya kedudukan bank Indonesia secara nyata dapat dilihat bahwa Bank Indonesia berhak menolak campur tangan dari siapapun dan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas-tugasnya ( Pasal 9). Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 67 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatakan :

Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 9 ayat (1) , diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar) dan paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar)..

Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran dan membina dan mengawasi perbankan hal ini berarti

bahwa Bank Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menetapkan rezim devisa, menetapkan kurs mata uang, menetapkan jumlah uang yang beredar, menetapkan tingkat suku bunga, serta mebekukan operasi sebuah bank. Kemandirian ini sangatlah kuat dengan ancaman pidana dan denda bagi pihak yang mencoba melakukan intervensi.

Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan Internasional seperti diuraikan dalam Pasal 57 yang mengatakan :

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional.
- (2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan / atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

Dari Pasal 57 tersebut dapat dikaji bahwa Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga Internasional. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota lembaga Internasional dan atau lembaga lembaga multilateral sebagaimana dimaksud adalah negara, BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan yang cukup besar dalam menjalankan tugas-tugasnya dimana Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara. Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam pasal 53 UU Bank Indonesia yang mengatakan bahwa

Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Hal ini berarti hanya Bank Indonesia yang dapat mewakili pemerintah dalam hal menerima pinjaman dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Kewenangan yang begitu besar baik kewenangan internal maupun kewenangan internasional seperti telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa Bank Indonesia tidak hanya memiliki kewenangan internal yang kuat tetapi juga memiliki kewenangan internasional yang cukup kuat pula.

Bila dikaji lebih jauh kewenangan yang begitu kuat dan luas yang diberikan oleh undang-undang apalagi ditegaskan dalam konstitusi bahwa dalam melaksanakan kewenangannya itu Bank Indonesia bebas dari campur tangan pihak lain akan memunculkan tanggung jawab yang begitu besar bagi Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan kata lain kepada siapa Bank Indonesia bertanggung jawab bila ternyata tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga stabilitas nilai rupiah tidak tercapai ?

Dalam UU No 23 tahun 1999 tidak ditemukan mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut. Pasal 58 UU Bank Indonesia antara lain hanya mengatakan bahwa Bank Indonesia hanya mempunyai kewajiban sebatas menyampaikan informasi, laporan dan menyampaikan penjelasan baik kepada masyarakat, presiden, Badan pemeriksa keuangan (BPK), maupun kepada Dewan perwakilan rakyat (DPR). Dalam hal ini Bank Indonesia hanya diberikan kewajiban sebatas memberikan laporannya dan penjelasannya saja tetapi dalam undang-undang tidak ada ketentuan bagaimana jika dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut Bank Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau mengalami kegagalan dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, membina dan mengawasi bank sehingga kestabilan nilai rupiah tidak tercapai.

Bila kewenangan yang begitu besar dan kuat diberikan kepada Bank Indonesia maka seharusnya mekanisme pertanggungjawabannya harus juga disediakan, bila tidak maka hal tersebut akan menimbulkan celah-celah penyimpangan yang pada akhirnya akan menghambat tujuan yang ingin dicapai.



## **VI. Kesimpulan dan Saran**

### **VI.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sudah memberikan kedudukan yang mandiri kepada Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan tujuannya , hal tersebut sudah relevan dengan pengaturan mengenai kedudukan Bank Indonesia didalam pasal 23 D UUD 1945 yang sudah diamandemen .
2. Kedudukan Bank Indonesia yang mandiri tersebut memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bank Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam peraturan perundangan .

### **VI.2.. Saran**

Pemberian kedudukan yang mandiri kepada Bank Indonesia menuntut dibentuknya mekanisme pertanggungjawaban , dalam hal ini mekanisme yang paling tepat adalah Bank Indonesia bertanggung jawab kepada DPR sebagai wakil rakyat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Darji darmodiharjo & Shidarta, 2002, **POKOK-POKOK FILSAFAT HUKUM**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Gunarto Suhardi, 2002, **HUKUM PERBANKAN**, tanpa penerbit.
- Muhamad Djumhana, 1995, **HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Munir Fuady, 1999, **HUKUM PERBANKAN MODERN**, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhamad Nurlif, **URGENSI PENGATURAN PERANAN DAN KEDUDUKAN BANK SENTRAL DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI**, makalah disampaikan dalam seminar "Urgensi Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank sentral Dalam Amandemen Konstitusi" Yogyakarta 30 April 2002.
- Pradjoto, 2000, **DEREGULASI DAN REGULASI PERBANKAN**, tanpa penerbit.
- Revrison Baswir, 2002, **BAHAYA INDEPENDENSI BANK SENTRAL**, makalah disampaikan dalam seminar "Urgensi Pengaturan Peranan dan Kedudukan Bank sentral Dalam Amandemen Konstitusi" Yogyakarta 30 April 2002.
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, **HUBUNGAN BANK DAN NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO (SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DEPOSAN DI INDONESIA DEWASA INI)**, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soedijana, 1993, **PENGANTAR ILMU EKONOMI**, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, **PENGANTAR PENELITIAN HUKUM**, UI Press, Jakarta.
- Zainal Azikin, 1997, **POKOK-POKOK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Kompas, Marihot H. Tambunan, **DIBALIK INDEPENDENSI BANK SENTRAL AMERIKA SERIKAT**, 23 Desember 2000



## **Daftar Peraturan –Perundangan**

UUD 1945 yang sudah diamandemen

Perpu No 2 Tahun 1946 tentang BNI 1946

Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral

Undang –Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

